

DAMPAK SOSIAL DAN DAMPAK EKONOMI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TANAH MERAH

Muhammad Fathan Kamil, Aji Ratna Kusuma

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 2, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah.

Pengarang : Muhammad Fathan Kamil

NIM : 2102016077

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Mei 2026

Pembimbing,



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si.
NIP 195903081984032001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 14
Nomor	: 2
Tahun	: 2026
Halaman	: 320-329

DAMPAK SOSIAL DAN DAMPAK EKONOMI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TANAH MERAH

Muhammad Fathan Kamil¹, Aji Ratna Kusuma²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi dari pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, serta mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan teknis dalam implementasinya. Kebijakan strategis ini dirancang untuk mendistribusikan kewenangan dan alokasi anggaran sebesar Rp100 juta per Rukun Tetangga (RT) setiap tahunnya guna mendorong pemerataan pembangunan berbasis partisipasi akar rumput. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (Ketua RT, Ketua Pokmas, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM), observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Probebaya memberikan dampak sosial yang positif berupa penguatan kohesi sosial, peningkatan modal sosial, penguatan kapasitas kelembagaan lokal (RT dan Pokmas), serta eskalasi partisipasi warga dalam proses Musyawarah RT. Dari dimensi ekonomi, program ini menstimulasi aktivitas perekonomian melalui perbaikan infrastruktur fisik yang memperlancar aksesibilitas dan distribusi logistik usaha, mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Kendati demikian, efektivitas optimalisasi program masih dihadapkan pada sejumlah kendala, meliputi hambatan administratif dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), permasalahan legalitas aset Fasilitas Umum (FASUM) untuk pembangunan posyandu, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana, serta belum meratanya intervensi pemberdayaan ekonomi langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, penyederhanaan birokrasi administratif, penyelesaian status yuridis aset FASUM, serta perancangan program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci : Program Probebaya, Dampak Sosial, Dampak Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Administrasi Publik

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fathankamil1407@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan mensyaratkan adanya inisiatif nyata dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Dalam konteks otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Samarinda telah mengambil langkah progresif melalui peluncuran Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probabaya). Program unggulan ini lahir dari visi besar untuk mendistribusikan kewenangan dan alokasi sumber daya secara langsung hingga ke unit pemerintahan terkecil, yaitu Rukun Tetangga (RT) (Pemerintah Kota Samarinda, 2022). Probabaya tidak hanya berkedudukan sebagai skema dana hibah fiskal semata, melainkan sebuah kerangka kerja holistik yang mencakup pembangunan infrastruktur lingkungan, penguatan sektor ekonomi lokal melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pelestarian aspek sosial kemasyarakatan (Borneopos.com, 2025).

Keseriusan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengimplementasikan kebijakan ini diwujudkan melalui penetapan payung hukum yang jelas, yakni Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi ini secara mandatori membagi alokasi anggaran sebesar Rp100 juta per RT setiap tahunnya ke dalam dua pilar utama secara komprehensif, yaitu: (1) Program Bidang Pembangunan Infrastruktur Fisik, dan (2) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Non-Fisik). Pembagian ini dirancang agar setiap wilayah RT mampu menjawab kebutuhan mendesak di tingkat lokal secara mandiri dan terukur.

Secara teoretis, implementasi Probabaya dianalisis melalui lensa Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) yang dikembangkan oleh Perkins dan Zimmerman (1995), serta diperkuat oleh Teori Partisipasi Masyarakat dari Arnstein (1969) dan Teori Pembangunan Sosial dari Sen (1999). Pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas, kontrol, dan kapabilitas masyarakat agar mereka mampu mengelola kehidupan bersama secara efektif. Keberhasilan program pembangunan partisipatif semacam ini tidak hanya diukur dari kuantitas output fisik yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana kesadaran kritis, kapasitas kelembagaan, dan kemandirian kolektif masyarakat meningkat dalam merumuskan serta menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggal mereka (Sultan, 2024).

Penelitian ini memfokuskan lokus studi di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Pemilihan lokasi ini didasari oleh karakteristik sosio-demografis yang kompleks serta besarnya potensi lokal yang perlu dioptimalkan. Berdasarkan data BPS Kelurahan Tanah Merah Dalam Angka, wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dan terbagi ke dalam 31 Rukun Tetangga (RT) dengan topografi wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dan perbukitan bergelombang (BPS, 2024). Luasnya cakupan wilayah dan karakteristik topografi tersebut memunculkan tantangan tersendiri, terutama

terkait penyediaan infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi lingkungan, serta disparitas kesejahteraan ekonomi antar-RT. Di sinilah Probebaya hadir sebagai instrumen kebijakan publik yang vital untuk mengakselerasi pembangunan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi warga.

Meskipun demikian, dinamika implementasi di lapangan menunjukkan adanya anomali empiris yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, alokasi dana Probebaya telah berhasil mengeksekusi berbagai pembangunan fisik seperti semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase, pengadaan fasilitas posyandu, serta pelaksanaan program pelatihan vokasional seperti kursus mengemudi, pelatihan potong rambut, dan keterampilan kerajinan rumah tangga. Namun, di sisi lain, intervensi pemberdayaan ekonomi secara langsung berupa bantuan permodalan tunai bagi pelaku UMKM lokal belum sepenuhnya merata atau masih berada pada tahap inisiasi awal. Kendati demikian, para pelaku UMKM di Kelurahan Tanah Merah justru merasakan dampak tidak langsung (*indirect effect*) yang signifikan berupa peningkatan omzet, kelancaran distribusi barang, serta kemudahan mobilitas harian yang dipicu oleh masifnya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Kompleksitas sebaran program fisik dan non-fisik tersebut berjalan beriringan dengan berbagai kendala riil di tingkat akar rumput. Berbagai hambatan manajerial dan administratif, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya pengurus RT dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara tepat waktu, menjadi persoalan klasik yang kerap menghambat kelancaran pencairan dan pelaporan dana. Selain itu, ditemukan pula hambatan yuridis-administratif berupa ketidakpastian legalitas aset tanah Fasilitas Umum (FASUM) yang digunakan untuk pembangunan posyandu maupun balai warga. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

(1) Bagaimana dampak sosial dan dampak ekonomi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Tanah Merah? serta (2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Tanah Merah? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi ilmiah yang objektif, mendalam, dan komprehensif guna memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan

Kajian teoretis dalam penelitian ini dibangun di atas fondasi beberapa disiplin ilmu administrasi publik dan sosiologi pembangunan. Pertama, Teori Pembangunan ekonomi makro merujuk pada pemikiran Rostow (1960) mengenai tahapan pertumbuhan linear, yang memandang bahwa pembangunan suatu wilayah bergerak dari masyarakat tradisional menuju prasyarat lepas landas dan tahap lepas landas. Dalam konteks Probebaya, intervensi dana hibah per RT diposisikan sebagai katalisator untuk mendorong perekonomian lokal di

Kelurahan Tanah Merah bertransformasi ke arah kemandirian yang lebih progresif melalui penguatan sektor-sektor unggulan (*leading sectors*) seperti UMKM dan infrastruktur pendukung.

Kedua, Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*) oleh Perkins dan Zimmerman (1995) menegaskan bahwa esensi pemberdayaan adalah proses penguatan kapasitas individu, kelompok, dan komunitas agar memiliki kontrol mandiri atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Proses ini mencakup penguatan psikologis individu, penguatan kohesi kelompok, serta peningkatan kapasitas kolektif komunitas. Ketiga, Teori Pembangunan Sosial (*Social Development Theory*) yang dikembangkan oleh Sen (1999) melalui pendekatan kapabilitas (*capability approach*) menekankan bahwa pembangunan sejati harus berorientasi pada perluasan kebebasan substantif dan peningkatan kualitas hidup manusia, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi statistik semata.

Keempat, Teori Partisipasi Masyarakat melalui model "Tangga Partisipasi Warga" (*Ladder of Citizen Participation*) oleh Arnstein (1969) digunakan untuk membedah kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan melalui Musyawarah RT dan pengelolaan proyek melalui Pokmas. Spektrum partisipasi ini menguji apakah keterlibatan warga di Kelurahan Tanah Merah telah mencapai tingkat kekuasaan warga (*citizen power*) seperti kemitraan (*partnership*) dan delegasi kekuasaan, atau masih terjebak pada aras manipulasi dan tokenisme.

Konsep Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi

Dampak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perubahan nyata, baik jangka menengah maupun jangka panjang, yang bersifat positif maupun negatif, terencana maupun tidak terencana, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan suatu program kebijakan publik (Romadhon, 2018). Untuk mengukur dampak sosial, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja *Social Impact Assessment* (SIA) yang dikemukakan oleh Vanclay dan Esteves (2024). Penilaian dampak sosial difokuskan pada tiga indikator utama: (1) Partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan; (2) Kohesi sosial dan modal sosial yang mencakup tingkat kepercayaan (*trust*), solidaritas, dan tradisi gotong royong; serta (3) Penguatan kelembagaan lokal melalui optimalisasi peran aparatur RT dan Pokmas.

Sementara itu, untuk mengukur dampak ekonomi, penelitian ini merujuk pada kerangka ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Nafziger (2005). Analisis dampak ekonomi dijabarkan ke dalam empat indikator krusial: (1) Stimulasi aktivitas ekonomi masyarakat; (2) Efek pengganda (*multiplier effect*) dari pembangunan infrastruktur fisik terhadap kelancaran distribusi dan aksesibilitas usaha; (3) Penyerapan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan proyek swakelola; dan (4) Potensi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui dukungan fasilitas dan penciptaan ekosistem bisnis yang kondusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam, utuh, dan kontekstual mengenai realitas sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek penelitian (Creswell, 1999). Lokasi penelitian ditetapkan di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Penentuan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan kriteria keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun sebagai penerima manfaat Program Probebaya.

Informan kunci dan informan pendukung dalam penelitian ini meliputi: unsur aparatur kelurahan, para Ketua RT yang merangkap sebagai pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) yaitu Bapak Nazarudin (Ketua RT 05/Pokmas), Bapak Ngateman (Ketua RT 06), Ibu Ica (Ketua RT 07), Bapak Asik (Ketua RT 29), Bapak Harianto (Ketua RT 30), dan Bapak Eri Irawan (Ketua RT 31); para tokoh masyarakat dan pemuka warga; serta para pelaku UMKM lokal di Kelurahan Tanah Merah seperti Lilik Agung Wibowo, Muhammad Andra Saputra, Arya Ridho Saputra, dan Muhammad Fathariq Arsyi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) Wawancara mendalam (*in depth interview*) secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi subjektif informan; (2) Observasi partisipatif untuk mengamati langsung kondisi fisik infrastruktur hasil Probebaya, pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasional, serta dinamika Musyawarah RT; dan (3) Studi dokumentasi yang menelaah dokumen regulasi seperti Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022, data statistik BPS Kelurahan Tanah Merah Dalam Angka, laporan pertanggungjawaban Pokmas, serta arsip kebijakan terkait.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas empat tahapan yang saling berkesinambungan secara iteratif: pengumpulan data, kondensasi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Untuk menjamin keabsahan dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-informan) dan triangulasi metode (memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumen).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tanah Merah merupakan salah satu dari delapan kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Wilayah ini memiliki posisi geostrategis sebagai gerbang penghubung utama antara Kota Samarinda dengan kawasan utara Provinsi Kalimantan Timur, termasuk jalur logistik menuju Bandara Internasional APT Pranoto dan Kota Bontang.

Berdasarkan publikasi Kecamatan Samarinda Utara Dalam Angka (BPS, 2024), wilayah Kelurahan Tanah Merah terbagi ke dalam 31 Rukun Tetangga (RT) dengan karakteristik topografi yang bervariasi antara dataran rendah dan kawasan perbukitan bergelombang.

Kondisi topografi yang berbukit ini menuntut adanya intervensi pembangunan infrastruktur yang intensif, khususnya perbaikan akses jalan lingkungan dan sistem drainase untuk mencegah erosi dan genangan air. Pertumbuhan demografis yang pesat seiring masuknya arus pendatang menjadikan Tanah Merah sebagai kawasan pinggiran kota yang dinamis. Dalam kerangka inilah Program Probekaya hadir sebagai instrumen desentralisasi fiskal berbasis RT dengan alokasi dana sebesar Rp100 juta per tahun per RT, yang dikelola secara swakelola melalui kelembagaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan mekanisme musyawarah warga (Pemerintah Kota Samarinda, 2022).

Dampak Sosial Program Probekaya di Kelurahan Tanah Merah

Evaluasi terhadap dimensi sosial pelaksanaan Program Probekaya di Kelurahan Tanah Merah menunjukkan adanya transformasi positif yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan analisis empiris yang berlandaskan pada Teori Pemberdayaan Masyarakat (Perkins & Zimmerman, 1995) dan Teori Partisipasi Arnstein (1969), dampak sosial program ini dijabarkan ke dalam tiga indikator utama:

1. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan:** Pelaksanaan Probekaya telah berhasil mendorong peningkatan partisipasi aktif warga dalam forum Musyawarah RT. Berbeda dengan pola pembangunan top-down konvensional di masa lalu, mekanisme Probekaya mewajibkan adanya rembuk warga untuk menentukan jenis kegiatan prioritas, baik fisik maupun non-fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Ketua RT, tingkat kehadiran dan antusiasme warga dalam Musyawarah RT mengalami eskalasi yang nyata. Warga tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan terlibat langsung dalam merumuskan usulan pembangunan saluran drainase, semenisasi jalan, hingga penentuan peserta pelatihan keterampilan. Mengacu pada tangga partisipasi Arnstein (1969), kualitas partisipasi di Kelurahan Tanah Merah secara umum telah bergeser dari tingkat konsultasi menuju tingkat kemitraan (*partnership*), di mana warga memiliki ruang legal untuk menentukan arah alokasi anggaran di lingkungan mereka sendiri.
2. **Penguatan Kohesi Sosial dan Modal Sosial (*Social Capital*):** Implementasi program berbasis gotong royong dalam proyek swakelola Probekaya terbukti mampu merevitalisasi ikatan solidaritas antarwarga. Aktivitas kerja bakti dalam pengerjaan semenisasi jalan lingkungan dan pembangunan fasilitas umum memperlerat interaksi sosial yang sempat renggang akibat kesibukan individu. Rasa saling percaya (*trust*) dan norma resiprositas antarwarga semakin menguat. Selain itu, alokasi dana non-fisik untuk kegiatan keagamaan (seperti pengadaan alat musik hadrah/ketipung di rumah ibadah), dukungan

operasional posyandu, serta bantuan sosial bagi warga kurang mampu turut menciptakan iklim sosial yang inklusif dan harmonis di Kelurahan Tanah Merah.

3. **Penguatan Kelembagaan Lokal (RT dan Pokmas):** Program Probebaya memberikan dampak struktural yang positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput. Pengurus Rukun Tetangga (RT) bersama Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana hibah dituntut untuk menjalankan fungsi manajerial, mulai dari perencanaan teknis, penyusunan RAB, pengadaan barang, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun pada awalnya menimbulkan tantangan tersendiri, proses ini secara empiris meningkatkan keterampilan manajerial, akuntabilitas, dan kepemimpinan lokal aparatur RT dan pengurus Pokmas dalam mengadministrasikan program publik secara transparan.

Dampak Ekonomi Program Probebaya di Kelurahan Tanah Merah

Dari dimensi ekonomi, pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Tanah Merah memberikan implikasi yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Merujuk pada kerangka Teori Pembangunan Ekonomi (Nafziger, 2005) dan Teori Rostow terkait prasyarat lepas landas, dampak ekonomi program ini dianalisis melalui empat indikator utama:

1. **Stimulasi Aktivitas Ekonomi Masyarakat:** Program Probebaya menstimulasi dinamika ekonomi lokal melalui ketersediaan dana non-fisik yang dialokasikan untuk pelatihan keterampilan vokasional dan pemberdayaan. Berbagai pelatihan yang diselenggarakan, seperti kursus mengemudi, pelatihan potong rambut (pangkas rambut), pelatihan editing foto dan video, serta keterampilan pembuatan kerajinan tangan, memberikan bekal keterampilan praktis bagi pemuda dan warga pengangguran untuk membuka usaha mandiri atau terserap di pasar kerja.
2. **Efek Pengganda (*Multiplier Effect*) Infrastruktur Fisik:** Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas alokasi dana Probebaya di Kelurahan Tanah Merah diserap untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti semenisasi jalan lingkungan, perbaikan jembatan kecil, dan pembangunan saluran drainase. Meskipun bantuan modal langsung kepada UMKM belum merata di semua RT, pembangunan infrastruktur ini menghasilkan *multiplier effect* yang luar biasa bagi pelaku usaha lokal. Perbaikan jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang kini mempermudah aksesibilitas kendaraan pengangkut barang, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya operasional harian para pedagang keliling maupun pemilik warung sembako.
3. **Penyerapan Tenaga Kerja Lokal:** Mekanisme pelaksanaan proyek fisik Probebaya yang menggunakan pola swakelola murni melibatkan tenaga kerja dari warga setempat. Warga RT yang bertindak sebagai tukang dan pekerja harian diberdayakan secara langsung dalam pengerjaan proyek fisik di lingkungan mereka. Hal ini memberikan tambahan pendapatan langsung bagi

rumah tangga pekerja lokal selama masa pengerjaan proyek berlangsung, sehingga mendongkrak daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

4. **Potensi Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** Kelurahan Tanah Merah memiliki potensi UMKM yang cukup besar sebagai soko guru perekonomian lokal. Dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas lingkungan, kenyamanan konsumen yang berbelanja ke warung-warung dan sentra UMKM lokal meningkat secara signifikan. Selain itu, fasilitasi legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didorong melalui pendampingan kelurahan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM untuk mengakses layanan perbankan dan memperluas jaringan pemasaran produk mereka.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program Prokebaya

Kendati menunjukkan berbagai capaian positif yang signifikan di bidang sosial dan ekonomi, implementasi Program Prokebaya di Kelurahan Tanah Merah tidak terlepas dari sejumlah hambatan struktural, administratif, dan teknis di lapangan. Berdasarkan hasil analisis data empiris, hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat aspek utama:

1. **Hambatan Manajerial dan Administrasi (RAB dan SPJ):** Aspek administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar pengurus Pokmas dan Ketua RT. Keterbatasan latar belakang pendidikan teknis dan minimnya pelatihan akuntansi keuangan membuat para pengurus kerap mengalami kesulitan dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan standar birokrasi pemerintahan yang kaku. Akibatnya, proses pencairan tahap berikutnya sering mengalami penundaan administratif.
2. **Hambatan Yuridis-Administratif Legalitas Aset Fasilitas Umum (FASUM):** Dalam pelaksanaan pembangunan fisik tertentu, seperti pembangunan posyandu atau fasilitas komunal warga, ditemukan kendala terkait status kepemilikan lahan. Sebagian lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas umum belum memiliki kejelasan status legalitas atau sertifikasi yang sah atas nama pemerintah atau RT, sehingga menimbulkan kehati-hatian ekstra secara hukum yang berpotensi menunda eksekusi proyek fisik.
3. **Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana:** Beban kerja ganda yang diemban oleh Ketua RT sebagai pemimpin informal masyarakat sekaligus manajer operasional proyek swakelola Prokebaya sering kali melampaui kapasitas waktu dan tenaga yang tersedia. Ketiadaan tenaga pendamping profesional yang mendampingi secara intensif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi di setiap RT menyebabkan koordinasi teknis di lapangan kurang optimal.
4. **Belum Optimalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Langsung:**

Meskipun anggaran Rp100 juta per RT mencakup bidang non-fisik, porsi alokasi yang terserap untuk program pemberdayaan ekonomi langsung (seperti hibah modal tunai dan pendampingan intensif skala besar bagi UMKM) dirasakan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan masifnya volume pembangunan fisik infrastruktur. Hal ini menyebabkan dampak ekonomi langsung bagi pelaku UMKM belum merata secara optimal di seluruh 31 RT.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Tanah Merah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Probebaya memberikan dampak sosial yang sangat positif bagi masyarakat Kelurahan Tanah Merah. Hal ini terwujud melalui eskalasi partisipasi aktif warga dalam forum Musyawarah RT (mencapai tingkat kemitraan), penguatan kohesi sosial dan modal sosial melalui tradisi gotong royong dan kegiatan keagamaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan lokal aparatur RT dan pengurus Pokmas dalam mengelola program berbasis publik.
2. Dari dimensi ekonomi, Probebaya berhasil menstimulasi aktivitas perekonomian lokal melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan vokasional dan penciptaan multiplier effect dari pembangunan infrastruktur fisik. Perbaikan jalan lingkungan dan drainase memperlancar aksesibilitas distribusi barang, meningkatkan omzet UMKM, serta membuka kesempatan kerja harian bagi tenaga kerja lokal.
3. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih dihadapkan pada empat hambatan utama, yaitu: hambatan administratif dalam penyusunan RAB dan SPJ, permasalahan legalitas aset tanah FASUM, keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur pelaksana di tingkat RT, serta belum optimalnya porsi program pemberdayaan ekonomi langsung bagi pelaku UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, diajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu menyediakan program pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi pengurus Pokmas dan Ketua RT terkait penyusunan administrasi keuangan, RAB, dan pelaporan SPJ guna meminimalisir hambatan birokratis dalam pencairan dana.
2. Pemerintah kelurahan bersama instansi pertanahan daerah perlu segera memfasilitasi inventarisasi dan penyelesaian legalitas status hukum aset Fasilitas Umum (FASUM) di setiap RT agar pembangunan fasilitas publik dapat berjalan tanpa hambatan yuridis.
3. Perlu ditingkatkan porsi alokasi dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi non-fisik yang berfokus langsung pada penguatan modal,

pendampingan manajemen usaha, dan perluasan pasar bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tanah Merah.

4. Diperlukan penambahan tenaga pendamping profesional (fasilitator kelurahan) yang mendampingi secara intensif proses perencanaan dan pelaporan di setiap Rukun Tetangga guna meringankan beban administratif pengurus RT dan Pokmas.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Borneopos.com. (2025). *Evaluasi Capaian Program Unggulan Pemerintah Kota Samarinda*. Samarinda: Media Borneo Pos.
- BPS Kota Samarinda. (2024). *Kecamatan Samarinda Utara Dalam Angka 2024*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- Creswell, J. W. (1999). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nafziger, E. W. (2005). *Economic Development (4th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2022). *Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Samarinda: Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). *Empowerment Theory, Research, and Application*. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 569–579.
- Romadhon, A. (2018). *Evaluasi Dampak Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sultan, M. (2024). *Analisis Teoretis Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Desentralisasi Fiskal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–160.
- Vanclay, F., & Esteves, A. M. (2024). *Social Impact Assessment: Methods and Practical Guidance*. *Environmental Impact Assessment Review*, 45(1), 112–128.